# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Akrual Diskresioner

*Discretionary accruals* disebut juga dengan *abnormal accruals* sering digunakan sebagai proksi manajemen laba oportunistik dalam beberapa penelitian sebelumnya sesuai dengan konteksnya masing-masing, tetapi manajer mungkin mempunyai motivasi lain untuk mencatat *discretionary accruals* yaitu untuk memberikan sinyal mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa yang akan datang.

Menurut Chen and Cheng (2004) manajer mempunyai dua motivasi untuk mencatat *discretionary accruals* yaitu:

1) Motivasi kinerja yaitu manajemen mencatat *discretionary accruals* untuk mencerminkan laba secara lebih baik dampak kejadian-kejadian ekonomi penting terhadap laba.
2) Motivasi manajemen laba oportunistik yaitu bahwa manajemen mencatat *discretionary accruals* untuk memaksimalkan manfaat yang mereka peroleh dengan tidak bermaksud untuk mengungkapkan informasi privat.

Menurut Sulistiawan, et al, (2011) menyatakan akrual diskresioner adalah akrual yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen, seperti pertimbangan tentang penentuan umur ekonomis aset tetap atau pertimbangan pemilihan metode depresiasi. Menurut Sulistiawan, et al, (2011) akrual nondiskresioner (*nondiscretionary accruals*) adalah akrual yang dapat berubah

bukan karena kebijakan atau pertimbangan pihak manajemen, seperti perubahan piutang yang besar karena adanya tambahan penjualan yang signifikan. Sehingga perbedaan dari akrual diskresioner dengan akrual nondiskresioner terletak pada penyebab terjadinya akrual tersebut.

Menurut Sulistiawan, et al (2011) menyatakan akrual (*accruals*) adalah penjumlahan antara akrual diskresioner dan akrual nondiskresioner. Akrual merupakan perbedaan laba dengan arus kas operasi. Menurut Sulistiawan, et al (2011) makin besar perbedaannya, maka perbedaan itu disebabkan karena aspek akrual atau kebijakan akuntansi. Laba dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi, sedangkan arus kas operasional hanya berasal dari transaksi kas riil. Menurut Sulistiawan, et al (2011) makin tinggi nilai akrual menunjukkan adanya strategi menaikkan laba dan makin minus nilai akrual menunjukkan adanya strategi menurunkan laba.

Menurut PSAK 46 (2009), laporan keuangan disusun berdasarkan akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Model akrual melibatkan perhitungan total akrual. Model-model akrual menurut Belkaoui (2007:202) adalah sebagai berikut:

1. Model Heally (1985) menyatakan kelemahan model akrual adalah menganggap keseluruhan akrual ditimbulkan oleh manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Padahal kenyataannya, sebagian akrual perusahaan juga disebabkan oleh kegiatan operasional dan tidak menggambarkan manajemen laba. Total akrual dalam manajemen laba dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Discretionary Accrual*
   Adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Akrual yang muncul akibat diskresi manajemen atau berada di bawah kebijakan manajemen. Hal ini biasanya digunakan sebagai pengukur dalam manajemen laba dan besarannya merupakan hasil modifikasi angka-angka pada laporan keuangan untuk memenuhi tujuan manajemen sehingga keberadaan *Discretionary Accrual* menandakan rendahnya kualitas laba. Efek dari kualitas laba yang rendah adalah tidak adanya prediktif *value* dari laba, yang berarti informasi mengenai laba perusahaan ini tidaklah menggambarkan keadaan sesungguhnya dari perusahaan sehingga informasi laba menjadi bias bagi penggunanya.
b. *Non Discretionary Accrual*
   Adalah sebaliknya, pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Total akrual terdiri atas dua komponen yaitu *Discretionary Accrual* (DA) dan *Non Discretionary Accrual* (NDA).

2. Model De Angelo
   Porsi pilihan dalam model *De Angelo* adalah perbedaan antara akrual total di tahun peristiwa di simbolkan dalam aktiva total (At-1) dan akrual bukan pilihan (NDAt). Penghitungan akrual bukan pilihan (NDAt) bergantung pada akrual total diperiode sebelumnya (TAt-t) disimbolkan dengan aktiva total keseluruhan (At-2).
3. Model Jones
   Tujuan utama dari model Jones adalah untuk mengendalikan pengaruh perubahan dalam kondisi perusahaan pada akrual bukan pilihan.

Menurut Sulistiyanto (2007) perekayasaan menaikan atau menurunkan akrual antara lain dapat dilakukan dengan cara mempercepat pendapatan atau mempercepat beban. Perekayasaan laba tersebut termasuk salah satu praktek manajemen laba atau *earnings management* melalui perekayasaan akrual. *Discretionary Accrual* dapat dilakukan melalui kebijakan pemilihan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual namun bersifat subjek dan kontekstual, salah satu contoh dengan cara memperbesar atau memperkecil pencadangan

aktiva pajak tangguhan dengan pertimbangan laba yang akan datang dapat menutup atau tidak menutup terpulihkannya aktiva pajak tangguhan.

### 2.1.2 Pengukuran Manajemen Laba Dengan Pendekatan *Discretionary Accrual*

Menurut Belkaoui (2007) nilai yang timbul dari penggunaan basis akrual biasanya disebut total akrual dan dihitung dengan mengurangkan laba bersih sebelum pos luar biasa dengan arus kas pada operasi. Menurut Belkaoui (2007) akrual ini bisa dibedakan atas akrual diskresioner (*discretionary accrual*) yaitu akrual yang timbul dari diskresi/ keleluasaan yang dimiliki oleh manajemen untuk memilih metode, prinsip dan estimasi, serta akrual nondiskresioner (*non discretionary accrual*) yaitu akrual yang sudah ditetapkan oleh standar.

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan ukuran *discretionary accrual* yang diperoleh dari *error term* total akrual yang telah dimodifikasi oleh Dechow (1994). Perhitungan dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan *nondiscretionary accrual* (tingkat laba akrual yang wajar) dan *discretionary accrual* (tingkat laba akrual yang tidak normal).

Total akrual merupakan selisih antara net income dengan *cash flow operation* yang dirumuskan sebagai berikut (Belkaoui, 2007).

$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it}$ ..... (1)

Keterangan :

$TA_{it}$ = Total akrual perusahaan i pada tahun t.

$N_{it}$ = Laba bersih *(net income)* perusahaan i pada tahun t.

$CFO_{it}$ = Kas dari operasi *(cash flow operation)* perusahaan i pada tahun t.

Total akrual ($TA_{it}$) sendiri juga merupakan penjumlahan dari *nondiscretionary accrual* dengan *discretionary accrual* dengan persamaan berikut:

$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it}$ ..... (2)

Keterangan :

$NDA_{it}$ = *Nondiscretionary accrual* perusahaan i pada tahun t.

$DA_{it}$ = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t.

Total akrual kemudian dirumuskan oleh Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow et. Al (1995) sebagai berikut :

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / A_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Keterangan :

$A_{it-1}$ = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1 (awal tahun).

$\Delta REV_{it}$ = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1.

$\Delta REC_{it}$ = Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang tahun t-1.

$PPE_{it}$ = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t.

$\alpha$ = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$ = Koefisien masing-masing variable

$\varepsilon_{it}$ = *Error term* perusahaan i pada tahun t.

Perhitungan *nondiscretionary accrual* menurut model Jones yang dimodifikasi kemudian dirumuskan sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / A_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it} / A_{it-1}) \quad (4)$$

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it} \quad (5)$$

Menurut Belkaoui (2007:202) perbedaan utama antara model *De Angelo* dengan model *Heally* adalah bahwa NDA mengikuti proses acak dalam model De Angelo dan suatu proses rata-rata kebalikan dalam model Heally. Berdasarkan penelitian terdahulu model Heally paling baik mencerminkan manajemen laba (*discretionary accrual*).

### 2.1.3 Teori Pajak Tangguhan

Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) mengungkapkan bahwa :

> Pajak tangguhan merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2007) mengungkapkan bahwa pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2007) bahwa selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, di mana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiscal.

Menurut Waluyo (2008:216), mengungkapkan bahwa :

> pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat di kompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan.

Suandy (2008) juga menjelaskan bahwa apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang maka berdasarkan SAK dapat dianggap sebagai suatu aset. Menurut Suandy (2008)

apabila rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi berdasarkan peraturan perpajakan atau kemungkinan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang akan mengurangi beban pajak, maka dapat diakui sebagai suatu aktiva (aset) pajak tangguhan. Purba (2009) menyatakan bahwa apabila manfaat ekonomi yang dimaksud tidak dapat diperoleh, setiap tahun perusahaan harus melakukan penilaian kembali aktiva pajak tangguhan. Purba (2009) mengungkapkan jika terdapat kemungkinan suatu aktiva pajak tangguhan tidak mungkin dapat direalisasikan, maka dilakukan penyisihan (*allowance*) terhadap terealisasinya aktiva tersebut.

Agoes dan Trisnawati (2007) mengungkapkan bahwa aktiva (*asset*) pajak tangguhan terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi positif, di mana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial.

Muljono (2006) mengungkapkan bahwa apabila perusahaan secara komersial menghitung PPh yang terutang belum memperhitungkan koreksi fiskal maka akan menyebabkan perbedaan dengan perhitungan PPh terutang menurut fiskus, sehingga besarnya PPh terutang akan mempengaruhi posisi neraca secara laporan komersial. Muljono (2006) mengungkapkan perbedaan besarnya pajak terhutang tersebut harus dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian yang akan berpengaruh pada besarnya rekening hutang pajak dan juga mempengaruhi besarnya laba setelah pajak yang diakui oleh perusahaan dalam laporan laba rugi. Atas perubahan tersebut, perusahaan harus melakukan revisi posisi neracanya.

#### 2.1.3.1 Perlakuan Akuntansi Pajak Tangguhan Berdasarkan PSAK No. 46

Pada prinsipnya pajak tangguhan merupakan dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dengan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik di dalam pos neraca maupun laba rugi.

Menurut Hardi Cheng (2008) mengungkapkan bahwa :

> Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa mendatang, sebaliknya suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa mendatang.

Menurut Hardi Cheng (2008) bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak disajikan di dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa menyesatkan penggunanya sehingga diperlukan perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (selanjutnya disebut dengan PSAK No.46) tentang“ Akuntansi Pajak Penghasilan” yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1997. PSAK No. 46 diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan yang *go public* dan mulai tanggal 1 Januari 2001 bagi perusahaan yang tidak go public.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, akuntansi pajak tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan proses akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No. 46.

### 2.1.3.2 Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) mengungkapkan bahwa beban pajak tangguhan adalah besaran pajak yang didapat dari selisih antara beban (penghasilan) pajak dengan pajak kini dalam satu periode.

Suandy (2008 : 91) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban.

Menurut Suandy (2008 : 91) mengungkapkan bahwa :

> Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan.

Menurut Philips, *et al* (2003) dalam yulianti (2005) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) ”.

Menurut Purba (2009:14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok:

1) Perbedaan Permanen atau Tetap

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen.

2) Perbedaan Temporer atau Waktu

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya:

a) Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus.
b) Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan Rata-rata.
c) Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk Perusahaan Pertambangan, *Leasing*, Perbankan dan Asuransi.
d) Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia.

Menurut Purba (2009:35) mengungkapkan bahwa beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negatif dari beban pajak tangguhan. Menurut Purba (2009:35) mengungkapkan bahwa koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.

Menurut Zain (2008 : 98) mengungkapkan bahwa :

Apabila Penghasilan Sebelum Pajak (*Pretax Accounting Income)* lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak (*Taxable Income)* maka Beban Pajak (*Tax Expense)* pun akan lebih besar dari Pajak Terutang (*Tax Payable)* sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (*deferred tax liability).*

Menurut Agoes dan Trisnawati (2009) kewajiban Pajak Tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan.

#### 2.1.3.3 Pengukuran Manajemen Laba Dengan Pendekatan Beban Pajak Tangguhan

Variabel ini diukur dengan rumus beban pajak tanggungan dibagi dengan total aset awal tahun :

$$DTE_{it} = \frac{Deferred\ Tax\ Expense\ t}{Ait}$$

$DTE_{it}$ = Beban pajak tangguhan perusahaan i tahun ke-t

*Deferred Tax Expence* t = Beban pajak tangguhan tahun ke-t

Ait = Total aktiva perusahaan i tahun ke-t

### 2.1.4 Manajemen Laba (*Earning Management*)

Menurut Halim ,dkk (2005) laba merupakan salah satu informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan dan penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Halim ,dkk (2005) walaupun laba bukan satu-satunya informasi yang tersedia, akan tetapi laba sering menjadi fokus utama pemakai laporan keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan. Menurut Halim ,dkk (2005) kecenderungan investor yang memfokuskan pada informasi laba sebagai dasar pembuatan keputusan akan dimanfaatkan manajer untuk

memanipulasi pelaporan laba dengan menggunakan fleksibilitas dari kebijakan akuntansi yang ada. Menurut Halim ,dkk (2005) manajer dalam hal ini diperbolehkan untuk memilih metode akuntansi selama masih dalam koridor *General Accepted Accounting Principles* atau sesuai dengan SAK yang berlaku. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba atau *earnings management.*

Copeland (1968 :10) dalam Utami (2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut :

"*some ability to increase or decrease reported net income at will*". Ini berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajer.

Scott (2000) dalam Rahmawati dkk. (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua.

1. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political costs (opportunistic earnings management).
2. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (efficient earnings management), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Menurut Schipper (1989) dalam Rahmawati dkk. (2006) yang menyatakan bahwa :

> manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut).

Menurut Surifah (1999) menyatakan bahwa :

> *earning management* dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk pengambilan keputusan, karena *earning management* merupakan suatu bentuk manajemen laba atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan.

Dechow, Patricia M. dan Douglas J. Skinner (2000) dalam Kusuma (2006) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Dechow, Patricia M. dan Douglas J. Skinner (2000) dalam Kusuma (2006) mengungkapkan bahwa maksud dari intervensi di sini adalah upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholders* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan (*fashioning, accounting, reports*), terutama angka yang paling bawah, yaitu laba.

Sulistyanto (2007) menyatakan bahwa :

> walaupun terdapat beberapa definisi tentang manajemen laba, definisi tersebut memiliki benang merah yang menghubungkan definisi yang satu dengan yang lainnya, yaitu menyepakati bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi

> data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan.

### 2.1.4.1 Teori yang Melandasi Praktik Manajemen Laba

Sulistyanto (2007) menyatakan bahwa munculnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen, dilandasi oleh dua teori, yaitu *agency cost* (teori keagenan) dan *positive accounting theory* (teori akuntansi positif).

1) *Agency Theory* (Teori Keagenan)

> Jensen dan Meckling (1976) dalam Haryono (2005) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan orang lain atau *agent* (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Di dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan sedangkan agent adalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya (Sanjaya, 2004 dan Sulistyanto, 2007 dalam Haryono, 2005).

*Agency theor*y memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya melalui pembagian *deviden* atau kenaikan harga saham perusahaan. *Agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan. Sedangkan *agent*

mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan.

Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* dan dikenal dengan istilah asimetri informasi. Menurut Widyaningdyah (2001) menyatakan bahwa asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*.

*2) Positive Accounting Theory* (Teori Akuntansi Positif)

Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Anis dan Imam (2003) menyatakan bahwa akuntansi teori positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu :

1) antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*)
2) antara manajemen dengan kreditur (*the debt to equity hypothesis*)
3) antara manajemen dengan pemerintah (*the political cost hypothesis*).

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory*) yaitu :

1) *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang dapat diperoleh perusahaan.

2) *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian hutang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian hutang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian hutang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian hutang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian hutang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.

3) *The Political Cost Hypothesis*

Scott (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Scott (2003) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba :

1) *Bonus Purposes*
   Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *oportunistic* untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.
2) Kontrak Utang Jangka Panjang
   Semakin dekat perusahaan dengan perjanjian kredit, maka manajer akan cenderung memilih prosedur yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam pelunasan hutang.
3) *Political Motivations*
   Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik

yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4) *Taxation Motivations*
   Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.
5) *Pergantian CEO*
   CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
6) *Initital Public Offering (IPO)*
   Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.
7) Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor
   Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Karena manajemen laba tidak dapat diukur secara langsung, maka beberapa literatur manajemen laba memaparkan tentang metode-metode yang dapat berpotensi untuk dapat digunakan sebagai identifikasi manajemen laba. Xiong Yan (2006) mengemukakan empat metode yang dapat menjadi instrumen manajemen laba, yaitu:

1) *The discretionary total accrual model*
   Model total akrual diskresioner merupakan model yang paling umum digunakan untuk mengukur manajemen laba. Metode ini mengasumsikan bahwa manajer secara pokok mendasarkan pada kebebasan akuntansi akrual tertentu sebagai instrument manajemen laba, Jones (1991). Akuntansi akrual terdiri dari akrual diskresioner yang ditentukan oleh manajemen dan akrual non diskresioner yang ditentukan secara ekonomi. Oleh karena itu model ini memisahkan terlebih dahulu pada kedua komponennya.

Akrual diskresioner selanjutnya digunakan sebagai proksi manajemen laba.

2) *The single accrual model*

Model ini mengevaluasi menejemen laba dengan menggunakan satu macam akrual saja misalnya dengan estimasi depresiasi (Teoh,et.al, 1998) *deffered tax valuation allowance*. Pengukuran manajemen laba dengan menggunakan satu macam akrual memiliki kelemahan yaitu manajemen laba dapat dideteksi jika akrual yang diuji dapat dikelola dan biasanya sulit untuk mengidentifikasi akrual yang secara khusus digunakan untuk melakukan manajemen laba. Walaupun akrual yang tepat telah diuji, dampak dari pengelolaan akrual tunggal secara individu mungkin akan memberikan hasil statistik yang tidak signifikan. Kelemahan yang kedua adalah secara logis diasumsikan bahwa manajer mungkin menggunakan lebih dari satu macam akrual ketika melakukan manajemen laba. Dengan demikian, manajemen laba akrual tunggal mungkin dapat mendeteksi secara efektif pada beberapa situasi namun metode tersebut gagal dalam mendeteksi manajemen laba pada sebagian besar situasi (Xiong Yan, 2006).

3) *The total accrual model*

Metode total akrual mengevaluasi manajemen laba dengan menggunakan total akrual dan perubahan kebijakan akuntansi, sebagaimana yang digunakan Healy (1985). Healy (1985) menyatakan bahwa total akrual lebih efektif daripada perubahan kebijakan akuntansi dalam mendeteksi manajemen laba karena perubahan kebijakan akuntansi lebih sulit dan lebih mahal untuk dilakukan.

4) *The distribution model*

Metode ini menguji kelaziman manajemen laba dengan tujuan menghindari pelaporan rugi dan atau penurunan laba. Burgstahler dan Dichev (1997) menguji distribusi laba dan laba periode berjalan yang dilaporkan untuk mendeteksi adanya manajemen laba. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat frekuensi terjadinya manajemen laba yang lebih tinggi pada perusahaan dengan kecondongan laba positif dibandingkan pada perusahaan yang memiliki kecondongan laba negatif. Pendekatan ini dinilai lebih obyektif dibanding pendekatan lainnya namun pendekatan ini gagal melaporkan perluasan manajemen laba dan metode atau akrual khusus yang digunakan untuk melakukan manajemen laba (Healy & Wahlen, 1999).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Akrual Diskresioner Terhadap Manajemen Laba

Menurut IAI (2007) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomis. Menurut Winda (2008) agar laporan mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Menurut Sulistiyanto (2007:161) menyatakan bahwa penyusunan laporan yang menggunakan metode akrual di gunakan oleh para manajer dengan memanipulasi laba sedemikian rupa untuk mempengaruhi keputusan stakeholder. Menurut Elingga (2008) menyatakan bahwa ada kecenderungan para manajer untuk mengatur laba sedemikian rupa dengan menerapkan *income-increasing discreationary accruals* (artinya usaha untuk merekayasa laba dengan menaikkan tingkat laba pada tingkat tertentu untuk membalikkan kebijakan akrual yang dilakukan sebelumnya).

Menurut Sulistyanto (2007:161) mengungkapkan bahwa dasar akrual umumnya memberikan indikasi yang lebih baik dalam laporan keuangan karena transaksi dan peristiwa keuangan diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Menurut Sulistyanto (2007:161) mengungkapkan namun konsep akrual tersebut memiliki kelemahan yaitu dapat dimanfaatkan untuk rekayasa angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga dapat digunakan untuk mengubah

angka laba yang dihasilkan apabila standar akuntansi memungkinkan melalui praktik manajemen laba.

Berdasarkan penelitian Subagyo (2010) menguji tentang "Pengaruh *Discretionary Accr*ual dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba" dan menemukan bahwa terdapat 3 fenomena, yaitu: beban pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, *discretionary accrual* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, beban pajak tanggungan dan *discretionary accrual* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Feni (2012) mengenai "Pengaruh aset pajak tangguhan, diskresioner akrual, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Penelitian tersebut membuktikan bahwa aset pajak tangguhan, *discretionary accrual*, dan tingkat hutang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hanya ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Suranggane (2007) menguji pengaruh aset pajak tangguhan dan diskresioner akrual terhadap manajemen laba selama tahun 2003-2005 pada 66 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan hanya diskresioner akrual yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan aset pajak tangguhan tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

### 2.2.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

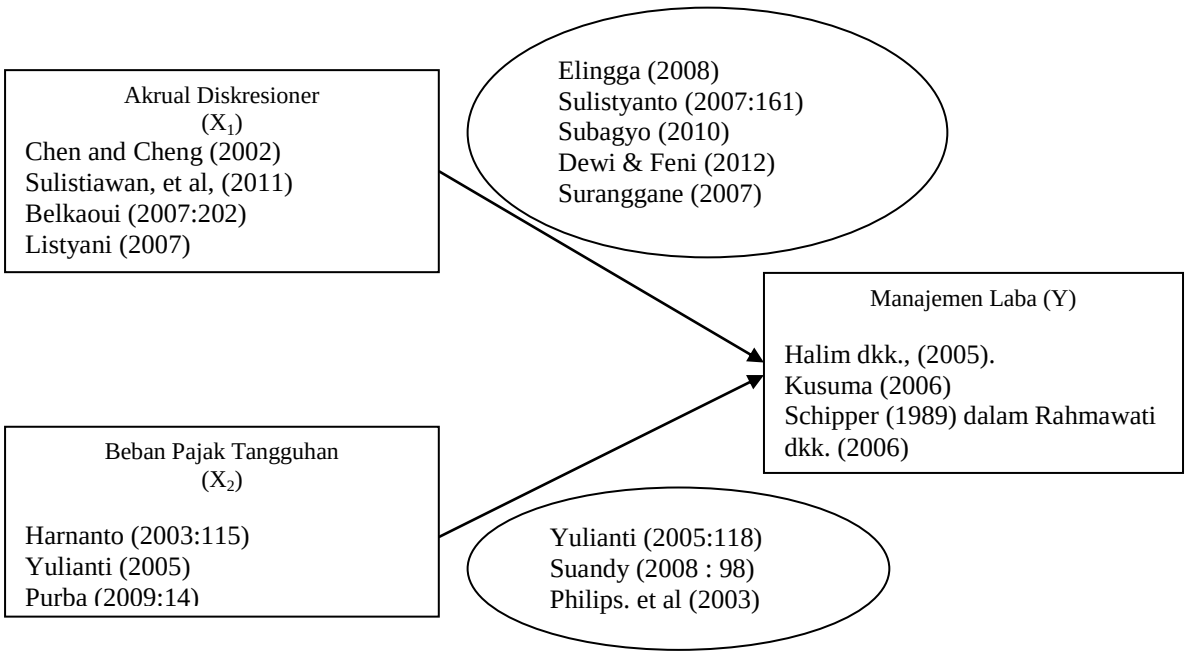
Menurut Yulianti (2005) menyatakan bahwa semakin besar presentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi yang semakin liberal. Menurut Yulianti (2005:118) menyatakan bahwa perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau *earnings management* dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi.

Suandy (2008 : 98) menjelaskan bahwa jika tujuan manajemen laba adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, maka manajemen laba secara hakikat ekonomisnya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Berdasarkan penelitian Philips. et al (2003) membuktikan adanya praktik manajemen laba dengan menggunakan beban pajak tangguhan. Penelitian yang dilakukan Yulianti (2005) juga menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan positif signifikan dengan probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian perusahaan. Manajemen laba merupakan peluang bagi manajemen untuk merekayasa besarnya beban pajak tangguhan guna menaikan dan menurunkan tingkat labanya. Beban

pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang dan mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan. (Yulianti 2005). Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas maka diekspektasi peranan yang signifikan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba (*earnings management*).

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka paradigma penelitiannya yaitu sebagai berikut :




**Gambar 2.1**
**Paradigma Penelitian**

## 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93), mendefinisikan hipotesis sebagai berikut: "Hipotesis merupakan jawaban sementara."

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut :

H1 : Akrual Diskresioner berpengaruh terhadap manajemen laba.

H2 : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.